ALAMAT MENGAJUKAN GUGATAN DAN TUNTUTAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bening Waskito Nugraha
Email: beningwaskitonugraha@gmail.com
No BP: 2010003600238
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum Indonesia menganut konsepsi *welfare state* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang merupakan tujuan negara. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah mengadakan hubungan-hubungan baik yang bersifat hubungan hukum maupun hubungan nyata dengan sesama aparat negara maupun dengan pihak perorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun manusia pribadi (individu). Dalam menjalin hubungan hukum inilah terbentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas Pemerintah yang berunsurkan perbuatan-perbuatan aparat pemerintah. Dalam hukum administrasi yang penting adalah tindakan hukum, sebab suatu tindakan hukum akan

menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi mereka yang terkena tindakan tersebut. Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat diuji keabsahannya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan atau seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke PTUN. Dalam PTUN, seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dipercaya telah merugikan individu dan atau masyarakat. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN.

B. PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hubungan antara seseorang atau badan hukum perdata pasti akan terdapat beberapa permasalahan atau yang disebut dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat terjadi di pusat maupun di daerah atas akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam sengketa bidang Tata Usaha Negara, pasti terdapat suatu Gugatan Tata Usaha Negara yang berupa permohonan tuntutan yang ditujukan kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan demi mendapatkan suatu keputusan.

Ketika melakukan proses acara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait alasan pengajuan gugatan harus didasari dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau yang dikenal dengan AAUPB. Hal tersebut bertujuan agar alasan pengajuan gugatan selain Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan bertentangan dengan Peraturan perundangundangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai alasan

pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Selanjutnya, dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan, terdapat kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan putusan melalui adanya uang paksa dan sanksi administratif. Kedua hal tersebut akhirnya merubah sistem eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang semula dari floating execution dan menjadi fixed execution atau yang disebut eksekusi di mana pelaksanaannya bisa dipaksakan oleh pengadilan melalui sarana-sarana pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa Tata Usaha Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara memiliki asas contractus actus yang mengungkapkan bahwa penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan harus pula memenuhi suatu persyaratan seperti pada awal keputusan tersebut dibuat. Hal-hal itu telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa PTUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Adapun subjek atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari Peradilan Tata Usaha adalah penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Jadi, pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan

2. Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, Tergugat merupakan jabatan yang ada pada Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang dari Badan Tata Usaha itu atau wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bukanlah orangnya secara pribadi yang digugat, tetapi jabatan yang melekat pada orang tersebut.

Gugatan sengketa yang akan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha harus berbentuk tertulis karena hal itulah yang akan menjadi pondasi bagi pengadilan dan para pihak itu sendiri dalam pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Di mana isi dari tuntutan gugatan Tata Usaha Negara itu sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya terdiri dari tuntutan pokok yang bermaksud agar Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya dianggap batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengajukan Gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha yang telah diatur pada Pasal 52 ayat (1) UU PTUN. Selain itu, alasan atau dasar gugatan ditunjukkan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, antara lain:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
3. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain.

Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundangundangan yang sifatnya Material atau Substansial, seperti ketentuan peraturan perundangundangan yang menentukan bahwa sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan, pegawai yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi, apabila terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum Keputusan TUN dikeluarkan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang sifatnya prosedural ataupun formal. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya substansiil, seperti keputusan yang berada dalam tingkat banding administratif yang salah dan menyatakan bahwa gugatan penggugat diterima atau tidak diterima.

Ketika mengajukan suatu gugatan, harus selalu memperhatikan tenggang waktu atau kapan seseorang maupun badan hukum perdata dapat mengajukan gugatannya tersebut. Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Berarti bahwa sesudah tenggang waktu Sembilan puluh hari dan telah terhitung saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dinyatakan tidak boleh diterima oleh pengadilan dan keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata yang telah dikatakan sah dan tidak diubah lagi melalui proses hukum. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan TUN dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan yang berwenang, agar tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan. Apabila lewatnya dalam mengajukan gugatan dapat

mengakibatkan gugatan tidak diterima atau kadaluarsa. Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa atau lisan di persidangan. Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Sesuai dengan pasal 54 UU PTUN menegaskan alamat melakukan gugatan dirumuskan berbunyi sebagai berikut:

1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

5. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
6. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Karena keterbatasan sumber daya, negara Indonesia belum bisa menerapkan seutuhnya ketentuan pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Dimana hanya terdapat 4 (empat) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibandingkan dengan jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan hanya terdapat 28 (dua puluh delapan) Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. PTTUN MEDAN, alamat Jl. Peratun Komplek Estate, Medan 20371
 - 1.1. PTUN Banda Aceh, alamat Jl. Ir. Moh. Tahir No.25 Lueng Batu, Aceh
 - 1.2. PTUN Medan, alamat Jl. Listrik No.10 Medan 20112
 - 1.3. PTUN Padang, alamat Jl. Diponegoro No.8 Padang 25117
 - 1.4. PTUN Pekanbaru, alamat Jl. Raya Bangkinang KM-9 Pekanbaru
 - 1.5. PTUN Jambi, alamat Jl. Kol. M. Kukuh 1 Kota Baru, Jambi
 - 1.6. PTUN Palembang, alamat Jl. A.Yani No.67 Plaju, Palembang
 - 1.7. PTUN Bengkulu, alamat Jl. RE Martadinata Bengkulu
 - 1.8. PTUN Bandar Lampung, alamat Jl. P.Emir M.Noer 27 Bandar Lampung

- 1.9. PTUN Tanjung Pinang, alamat Jl. Ir. Sutami No.3 Sekupang Pulau Batam
2. PTTUN JAKARTA, alamat Jl. Cikini Raya 117-A Jakarta Pusat
 - 2.1. PTUN Jakarta, alamat Jl. A Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Jakarta Timur
 - 2.2. PTUN Bandung, alamat Jl. Diponegoro No.34 Bandung
 - 2.3. PTUN Banjarmasin, alamat Jl. Hasan Basri 32 Kayutangi, Banjarmasin
 - 2.4. PTUN Pontianak, alamat Jl. A. Yani 10 Pontianak
 - 2.5. PTUN Samarinda, alamat Jl. Bung Tomo – Samarinda
 - 2.6. PTUN Palangkaraya, alamat Jl. Cilik Riwut KM-5 Palangkaraya
 - 2.7. PTUN Serang, alamat Jl. Tubagus Suwandi, Nomor 2 E, F, G Ciracas, Serang
3. PTTUN SURABAYA, alamat Jl. Ketintang Madya IV/2 Surabaya
 - 3.1. PTUN Surabaya, alamat Jl. Letjen Sutoyo 226 Medaeng-Waru, Sidoarjo
 - 3.2. PTUN Semarang, alamat Jl. Abd Rahman Saleh 89 Semarang
 - 3.3. PTUN Yogyakarta, alamat Jl. Janti No.66 Banguntapan, Bantul
 - 3.4. PTUN Denpasar, alamat Jl. Kapt Cok Agung Tresna 4 Denpasar
 - 3.5. PTUN Mataram, alamat Jl. Dr Soedjono Lingk Sel-Mataram
 - 3.6. PTUN Kupang, alamat Jl. Palapa 16-A Kupang
4. PTTUN MAKASSAR, alamat Jl. AP Pettarani 45 Makassar
 - 4.1. PTUN Makassar, alamat Jl. Bontolangkasa 1 Makassar
 - 4.2. PTUN Palu, alamat Jl. Moh Yamin 52 Palu
 - 4.3. PTUN Manado, alamat Jl. Pommorouw – Manado
 - 4.4. PTUN Kendari, alamat Jl. Raya Anduonohu 7 Kendari
 - 4.5. PTUN Ambon, alamat Jl. W.Monginsidi 168 Ambon

4.6. PTUN Jayapura, alamat Jl. Raya Sentani Waena- Jayapura

C. PENUTUP

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk melayani apabila terdapat suatu kepentingan yang berbenturan, adanya perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kewenangan dari Peradilan Tata Usaha ini sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa dalam ranah Tata Usaha Negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan masing-masing berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum, maka gugatan itu dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jika tergugat tidak berada dalam satu daerah hukum dengan tempat kedudukan penggugat, maka gugatan dapat juga diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan di daerah hukum tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..